

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Depok.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. 2016. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Pers. Malang.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- HAW Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Inu Kencana Syafie. 2019. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan, Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan ke-11. Rajawali Pers. Depok.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. 2004. P.T. Alumni. Bandung.
- Ni'matul Huda. 2009. *Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan*. Zanafa Publishing. Pekanbaru Riau.



HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Depok.

Wasistiono dan Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press. Jatinagor.

Saiful Anwar dan Marzuki Lubis. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Gelora Madani Press. Medan.

Saldi Isra. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia – Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Rajawali Pers. Depok.

Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press. Malang.

Suriansyah Murhaini. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Taliziduhu Ndraha. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. cetakan kedua. Kencana-Prenadamedia Group. Jakarta.

Togar Sibarani dan Edang M. Kendana. 2020. *Dinamika Hubungan Kepala Daerah – DPRD, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jatinangor. Sumedang.

Yusnani Hasyimzoem, dkk. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Depok.

Jurnal

Budiyono. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.7. Nomor 1. Januari-April 2013.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 17. Nomor 3. 2020.

Hananto Widodo. *Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Perspektif Hukum. Vol. 19. Nomor 2. November 2019.



ahya. *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*. Jurnal tudy Agama dan Masyarakat, Vol. 14, Nomor 01. 2018.

Ismail, Andi Pangerang Moenta, Zulkifli Aspan, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada Pembentukan Peraturan Daerah Responsif*. Jurnal SASI, Vol. 27, Nomor 3. Juli-September 2021.

Jetter Wilson Salamony. *Tinjauan Perubahan Nomenklatur Kepala Daerah Menjadi Kepala Otorita Pada Ibu Kota Negara Indonesia*. Jurnal IKAMAKUM. Vol. 2. Nomor 1. 2022.

Publikasi Online

BBC News, *Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan 'melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang' dan tidak demokratis*, dapat diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024.

Danu Damarjati, *IKN Nusantara tak demokratis: pemimpin tak dipilih rakyat-tanpa DPRD*, dapat diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5912159/iqn-nusantara-tak-demokratis-pemimpin-tak-dipilih-rakyat-tanpa-dprd>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

Fitria Chusna Farisa, *Belum Genap Sebulan Disahkan, Kini UU IKN Digugat ke MK*, dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/05400041/belum-genap-sebulan-disahkan-kini-uu-ikn-digugat-ke-mk/>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

Rosiana Haryanti, *Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota*, dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022.

Sekretariat Negara, *Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Ibu Kota Baru*, dapat diakses melalui https://www.setneg.go.id/baca/index/penajam_paser_utara_dan_kutai_kartanegara_ibu_kota_baru, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.



Sekretariat Negara, *Presiden Jokowi Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara*, dapat diakses melalui https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_ibu_kota_baru

u di penajam paser utara dan kutai kartanegara, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Pengawasan Pemerintahan IKN Nusantara di Tangan DPR*, dapat di akses melalui <https://www.kppod.org/berita/view?id=1055>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

SKRIPSI

Nur Wahyuni Utami, 2018, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peraturan Daerah di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

